

RELASI EKONOMI-POLITIK  
DALAM PERSPEKTIF *DEPENDENCIA*

**Ismah Tita Ruslin**  
**Jurusan Ilmu Politik**  
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
**Alamat: Jl. RS. Faisal XIV Blok E/74**

**Abstrak**

*Pendekatan dependencia (ketergantungan) pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan keterbelakangan negara-negara di Dunia Ketiga dalam perspektif ekonomi-politik global secara struktural, khususnya negara-negara bekas jajahan. Pendekatan ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang "menuduh" bahwa keterpurukan pembangunan di Dunia Ketiga disebabkan oleh faktor internal negara-negara Dunia Ketiga. Meski demikian keberadaan teori ini juga tidak lepas dari kritikan, salah satunya dianggap gagal mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara Dunia Ketiga, khususnya munculnya New Industrializing Countries (NICs) seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hongkong. Namun demikian keberadaan teori dependencia tetap dianggap penting, dengan segala pandangan dan perdebatannya, karena teori ini telah memberikan perspektif baru bagi pengembangan teori-teori pembangunan. Ditengah perdebatan, tatanan ekonomi dunia baru memang sangat dibutuhkan dalam hal ini tatanan yang lebih adil tentunya dan ekonomi Islam dapat dijadikan salah satu solusinya, karena dibangun diatas prinsip 'adalah (keadilan).*

*Key words; Dependencia dan Ekonomi Politik dan Negara Berkembang*

**I. Pendahuluan**

Kajian *Dependencia* muncul dipermukaan pada era tahun 60-an di Amerika Latin, sebagai bentuk perlawanan Dunia Ketiga<sup>1</sup> terhadap paradigma modernis Eropasentris.<sup>2</sup> Secara filosofis, teori dependensi menghendaki peninjauan kembali pengertian pembangunan ekonomi, dimana pembangunan tidak harus dan tidak tepat hanya diartikan sekedar proses industrialisasi, peningkatan keluaran (output), dan peningkatan produktivitas, tapi proses pembangunan seperti yang dikatakan Soemitro dalam Deliarnov<sup>3</sup> juga harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan pembebasan negara berkembang dari belenggu tata ekonomi dunia.

Pengelompokan dengan tolak ukur pembangunan ekonomi berawal dari teori pembagian kerja internasional pada beberapa abad yang lalu yang dianut oleh para ahli ekonomi klasik, termasuk mereka yang punya posisi penting dalam menentukan kebijakan perdagangan luar negeri sebuah negara. Teori ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif (*comparative advantages*) yang dimiliki oleh setiap negara, sehingga mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki.

Selanjutnya mereka memetakan dunia secara umum (perspektif ekonomi politik global) menjadi dua kelompok negara,<sup>4</sup> *Pertama*, kelompok negara-negara di bagian selatan dengan tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk spesialisasi bidang pertanian. Kelompok negara ini umumnya dikategorikan negara-negara berkembang, *Kedua*, kelompok negara-negara di belahan utara, yang iklimnya tidak cocok untuk usaha pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi dibidang industri, dengan mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi negaranya. Kelompok negara ini umumnya dikategorikan negara maju.

Karena adanya spesialisasi ini, maka terjadilah perdagangan internasional, dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara pertanian dapat membeli barang-barang industri secara lebih murah (dari pada memproduksi sendiri) dan begitupun sebaliknya negara-negara industri dapat membeli hasil-hasil pertanian secara murah (dibandingkan harus memproduksi sendiri). Disinilah terjadi keuntungan komparatif yang didasarkan pada *opportunity cost*.<sup>5</sup> Hal ini juga ditekankan Todaro bahwa :“Pembangunan yang didasarkan pada kemandirian diri sendiri melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggap pembangunan yang secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengan pembangunan yang mengikut sertakan diri dalam perdagangan internasional yang bebas dan tidak terbatas”.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, pembangunan yang paling baik suatu negara menurut teori di atas adalah adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya negara-negara saling tergantung dan akan lebih menguntungkan bila negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada.

Namun kenyataannya, apa yang diperkirakan jauh meleset yang tercipta justru kesenjangan (*gap*) besar diantara kedua kelompok negara yang telah dibedakan di atas. Negara-negara spesialisasi industri semakin kaya, sedangkan negara-negara spesialisasi pertanian semakin tertinggal. Neraca perdagangan kedua kelompok negara ini selalu menguntungkan negara-negara yang mengkhususkan diri pada produksi barang-barang industri, hingga berdampak ketergantungan negara pertanian / berkembang terhadap negara industri / maju.<sup>7</sup>

## II. PEMETAAN SEDERHANA POLA HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK

Secara umum dikenal bahwa ekonomi-politik merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Namun, ekonomi-politik pada dasarnya lebih luas daripada ekonomi tradisional. Obyek kajiannya meliputi proses-proses sosial dan institusional, diantaranya dengan melihat bagaimana kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>8</sup>

Dalam Budi Suryadi<sup>9</sup>, istilah ekonomi politik pertama kali digunakan antara lain oleh Montchreiten dalam bukunya *Trate de L Economic Politique*, James Stuart Mill dalam bukunya *Inquiry into Principles of Political Economy*, dan Frederyk Skarbek. Istilah ekonomi politik sangat populer pada abad XVIII. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan cara-cara pemerintah dalam mengatur perdagangan, pertukaran uang, dan pajak (secara kasar apa yang disebut dengan kebijakan ekonomi).

Caporaso dan Levine dalam Ahmad Erani Yustika<sup>10</sup> mengemukakan pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah.

Disamping itu harus juga dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi. Artinya instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar (*market mechanism*), harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan kata lain pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*).

Sedangkan Staniland (1985)<sup>11</sup> menjelaskan, ekonomi politik dari dua level pengamatan, yaitu pada sisi isi (*content*) dan dari sisi konteks (*context*). Dari sisi *content* ada beberapa macam teori ekonomi politik. Kriteria ini untuk mengidentifikasi apakah teori tersebut memperlihatkan suatu hubungan sistematis antara peristiwa-peristiwa ekonomi dengan proses-proses politik atau tidak. Hubungan sistematis antara ekonomi dan politik dapat dilihat dari tiga kemungkinan sebagai berikut: *Pertama*, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan proses politik. Ini lazim disebut model ekonomi politik 'deterministik'. Model ini mengasumsikan bahwa ada hubungan deterministik antara ekonomi dan politik, dimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi-institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. *Kedua*, ada hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik. Ini yang disebut ekonomi politik "interaktif" yang menganggap fungsi-fungsi politik dan ekonomi berbeda, tetapi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. *Ketiga*, terdapat hubungan perilaku yang berlanjut atau kontinyu (*a behavioural continuity*) antara ekonomi dan politik.

Walaupun aliran ekonomi politik cukup banyak, jika dilihat dari sisi *context* teori-teori ekonomi-politik secara kasar dapat dibagi atas dua kelompok saja<sup>12</sup>. Kelompok pertama disebut liberal, sedangkan kelompok kedua adalah para pengkritik kelompok liberal (marxisme). Lebih jelasnya aliran pertama terdiri atas; mazhab liberalis (mencakup ekonomi politik liberal klasik, ekonomi politik neo-klasik, ekonomi politik baru, dan neoliberalisme). Kelompok ini sangat menekankan alasan-alasan logika ekonomi rasional dan proses mekanisme pasar. Sedangkan aliran kedua, yaitu lahir dari dialektika pemikiran Marxisme yang banyak menggunakan analisis konflik dan kekuasaan dalam menelaah keputusan ekonomi yang merupakan hasil dari proses politik. Umumnya kelompok kedua ini digolongkan dalam kelompok ekonomi politik radikal. Meski penyebutan ekonomi politik radikal sebenarnya masih sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok strukturalis dan dependensia.

Kelompok pertama dalam analisisnya memanfaatkan perjuangan kelas internasional antara pemilik modal (kapitalis) dan kaum buruh (proletariat), untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka. Dimana kaum proletariat juga perlu mengambil inisiatif untuk mengembangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat metropolitan. Resepnya pembangunan periferi (pinggiran) harus dilakukan melalui periferi juga.

Sedangkan kelompok kedua melihat ketergantungan dari perspektif nasional dan regional dengan melihat keadaan di dalam dan di luar wilayah, dimana struktur dan kondisi interen dilihat sebagai faktor endogen, walau struktur interen ini, baik dimasa lalu maupun masa sekarang, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pendekatan kedua ini menurut Thee Kian Wie diadopsi oleh pakar-pakar dari wilayah-wilayah yang relatif terbelakang dalam pembangunan sosial ekonominya, khususnya di Amerika Latin dengan munculnya teori ketergantungan (*Dependencia*).

### III. DEPENDENCIA DAN INTI PEMIKIRANNYA

Pendekatan *Dependencia* pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global.<sup>13</sup>

Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan ketergantungan terjadi bila ekonomi beberapa negara (yang dominan tentu saja) bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara-negara tertentu (yang tergantung) mengalami perubahan tetapi hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.<sup>14</sup>

Teori ketergantungan tidak hanya berisi “kecaman” terhadap modernisasi Eropasentris, namun juga memberikan perspektif intelektual alternatif yang berakar di Dunia Ketiga.<sup>15</sup> Teori ini awalnya hendak menjelaskan persoalan keterbelakangan negara-negara bekas jajahan di Dunia Ketiga dan melihatnya dalam konteks global melalui pendekatan struktural yang di dasarkan pada pandangan Marxis yang berpangkal pada materialisme. Selain itu teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi yang “menuduh” bahwa keterpurukan pembangunan di Dunia Ketiga disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan sendiri.

Jadi dapat disebutkan bahwa teori ini lahir dari dua induk, yang pertama adalah teori Marxis tentang imperialisme, yang kedua adalah studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran (*periphery*), yang digambarkan melalui pemikiran para tokohnya antara lain oleh Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos.<sup>16</sup>

Raul Prebisch, melihat ketergantungan sangat berdampak negatif bagi negara pinggiran, adanya spesialisasi produksi yang didasarkan pada keunggulan komparatif bagi negara maju dengan produksi barang industri dan negara pinggiran dengan produksi pertanian yang semula diharapkan menguntungkan keduanya karena adanya saling ketergantungan. Tapi kenyataannya Prebisch melihat yang terjadi justru penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditi industri, karena barang-barang industri otomatis lebih mahal di banding produk pertanian, akibatnya terjadi defisit pada neraca perdagangan negara-negara pertanian.

Sementara Paul Baran, seorang pemikir Neo-Marxis yang menentang pendapat Marx tentang pembangunan di negara Dunia Ketiga, bila Marx mengatakan negara-negara kapitalis maju akan menularkan sistem kapitalismenya ke negara berkembang dan ini akan mengakibatkan kemajuan negara-negara berkembang. Baran menolak dan berpendapat lain sentuhan kapitalisme justru mengakibatkan negara-negara pra-kapitalis akan terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan.

Sistem kapitalis di negara kapitalis berbeda dengan sistem kapitalis di negara pinggiran. Di negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena penyakit *kretinisme*, orang yang diinggapi penyakit tetap kerdil dan tidak bisa berkembang. Sistem kapitalisme di negara berkembang merupakan kerjasama kaum bourgeois di negara kapitalis dengan pejabat di negara pinggiran yang menghasilkan kebijakan yang menguntungkan modal asing dan bourgeois lokal dengan mengorbankan kepentingan rakyat negara pinggiran.

Sementara itu dalam Deliarinov, Andre G Frank mewakili pemikir *Dependencia* mengajukan tiga hipotesis melihat pola hubungan metropolis (Negara Maju) dan negara-negara satelit (terbelakang):<sup>17</sup>

1. Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan.
2. Negara-negara terbelakang yang sekarang menjadi satelit, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom justru bila tidak terkait dengan metropolis dari kapitalis dunia dunia, atau kaitannya sangat lemah (tidak ada dominasi metropolis)
3. Kawasan-kawasan yang terbelakang saat ini, situasinya mirip dengan situasi sistem feodal di masa lalu, dimana ada kawasan yang memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional akan terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional.

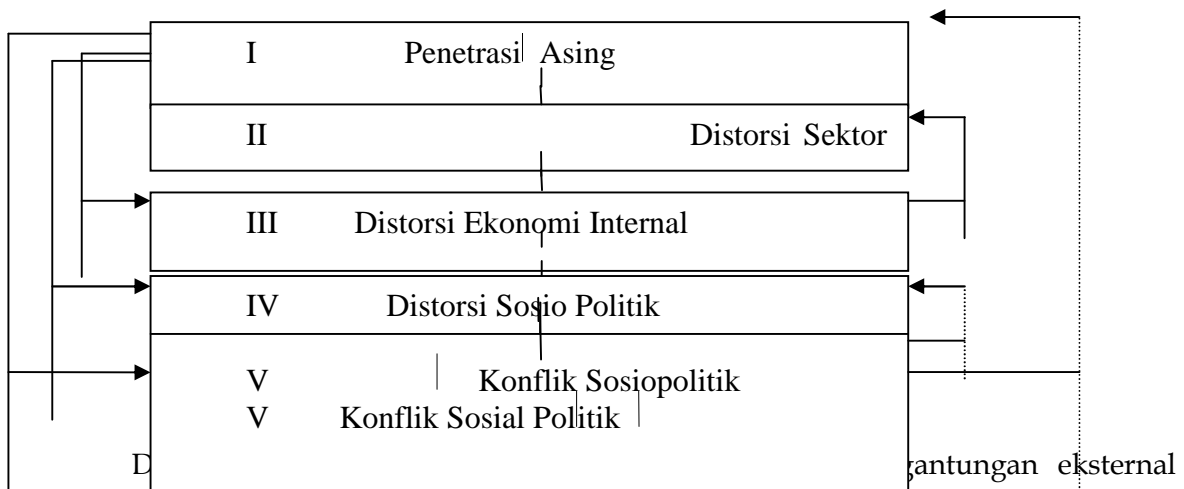
Dalam tinjauan aspek politik, pemikiran Frank menitik beratkan pada pola hubungan politis (dan ekonomi) antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara satelit. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara satelit hanya menguntungkan kepentingan modal asing dan kepentingan pribadi / kelompok dari para bourgeois lokal. Dimana keuntungan yang diperoleh tidak akan pernah menetes kebawah (*trickle down effect*).

Dalam Francis Abraham<sup>18</sup>, Frank juga menolak pandangan Marxis tentang pentahapan revolusi, yakni kalau suatu masyarakat feodal, perlu ada revolusi bourgeois dulu yang akan melahirkan masyarakat kapitalis, sebelum menjalankan revolusi sosialis. Menurut Frank perubahan yang diperlukan adalah langsung menuju pada sosialisme. Meskipun berusaha menghilangkan eksploitasi, kemiskinan dan keterbelakangan melalui "land reform" dan pembentukan "petani-petani keluarga" hanya akan mengubah bentuk eksploitasi tertentu dan tidak akan meletakkan suatu tujuan pada struktur kapitalis yang akan terus mendominasi dan mengeksploitasi sektor pertanian yang "egaliter" melalui monopoli-monopoli komersial.

Berbagai asumsi Frank yang terbangun di atas mengantarkan pemikir *Dependencia* yang terkenal radikal ini, mengemukakan satu jalan untuk kemajuan negara-negara pinggiran/satelit untuk maju yaitu hilangkan ketergantungan penuh terhadap negara maju/pusat atau putus hubungan dengan pusat.

Kenyataannya hampir semua negara Dunia Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam oleh, dan sangat tergantung pada negara-negara industri maju (atau negara-negara "pusat") dan terutama ekonomi dunia. Parahnya ketika penetrasi dan terjadinya distorsi ekonomi juga berkaitan dengan distorsi-distorsi lain dalam sistem sosial dan politik negara pinggiran, seperti yang digambarkan Raymond Duvall sebagai berikut:<sup>19</sup>

### Pola sederhana Teori *dependencia*



D...antungan eksternal menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi negara pinggiran (periphery) yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang parah dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang tergantung. Penetrasi ini bisa terjadi melalui berbagai cara, ekonomi, politik dan kultural.

Ditengah gempuran pemikiran pesimistis kalangan *dependencia* akan dampak yang ditimbulkan dari pola relasi ekonomi-politik terhadap negara pinggiran, muncul pemikir *dependencia* lainnya yang sedikit berbeda dengan pandangan "prototipe *dependencia*" sebelumnya, salah satunya Theotonio Dos Santos, yang lebih "halus" dibandingkan pemikiran "kasar, dogmatif" ala Frank.<sup>20</sup> Dos Santos, justru lebih optimis pada perkembangan negara pinggiran, menurutnya negara-negara pinggiran setelah mengadakan hubungan dengan negara-negara pusat masih ada kemungkinan untuk berkembang, meskipun dalam konteks perkembangan dalam ketergantungan. Santos sepenuhnya menyadari bahwa negara pinggiran merupakan bayangan dari negara pusat, justru itu yang membuatnya optimis bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang dan maju maka negara bayangannyapun dipastikan akan ikut berkembang dan akan maju juga, meskipun dalam bentuk perkembangan yang tergantung atau perkembangan ikutan.<sup>21</sup>

Sejauh ini bagaimanakah sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari pola relasi ekonomi-politik negara maju (pusat) terhadap Dunia Ketiga (negara berkembang/pinggiran/satelit)?

#### IV. Dampak Relasi Ekonomi-Politik Bagi Pembangunan Negara Berkembang

Sejak tahun 1993 Rudolf Straihm<sup>22</sup> telah menggambarkan kondisi kita hidup dalam sebuah dunia, dimana 26 % penduduknya (di negara-negara industri Blok barat dan Blok Timur) menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara itu, 74 % penduduk dunia di negara berkembang (di Afrika, Asia, dan Amerika latin) hanya mendapat jatah sekitar seperlima produksi dan kekayaan dunia.<sup>23</sup>

Keterbelakangan negara-negara berkembang juga tergambar dari pilar lingkungan hidup yang berada diambang kehancuran. Sebesar 42% dari jumlah total hutan tropis di dunia sebelum masa kolonialisasi telah rusak tanpa diperbaiki kembali.

Di Afrika Barat dan Afrika Timur sekitar 72%, di Afrika Tengah 45%, di Amerika Tengah dan Amerika Selatan 37%. Di daerah padat penduduk seperti Asia Selatan, hutan yang telah musnah sekitar 63%, di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Philipina) sekitar 38%,<sup>24</sup> disusul kebakaran hutan Kalimantan mengakibatkan kerusakan hutan tropis berjalan terus tanpa dapat dibendung.

Wajah keterbelakangan Dunia Ketiga semakin parah dipengaruhi krisis utang luar negeri. Di negara Dunia Ketiga tidak ada faktor lain yang lebih besar pengaruhnya dalam perubahan ekonomi politik selain utang luar negerinya. Sebab utama utang negara Dunia Ketiga adalah politik negara-negara industri yang menjual produk ekspornya dengan kredit yang "diobral" ke negara-negara ketiga dengan motto "*beli sekarang bayar belakangan*". Karena hanya dengan politik ini negara-negara industri bisa mengatasi krisis penjualan produk yang dihasilkan oleh dunia industrinya.

Sejarah utang luar negeri terus berkembang seiring lajunya gagasan globalisasi.<sup>25</sup> Globalisasi sebagai sebuah ide, tentu saja tidak muncul tiba-tiba, tetapi melewati proses yang amat panjang. Sekurangnya, gagasan globalisasi yang berporos pada pasar bebas telah direntangkannya sejak tahun 1947 ketika GATT (*General Agreement Tariff on Trade*) dimulai. Dalam aspek sejarah, permulaan periode tersebut ditandai dengan semakin mapannya ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga mereka mulai berfikir untuk melakukan ekspansi ke negara berkembang. Ekspansi tersebut tentu saja sulit dilakukan apabila setiap negara masih diberi otonomi melakukan proteksi terhadap barang dan jasa yang diproduksinya, khas warisan rezim merkantilis.

Dengan basis pemikiran itulah globalisasi disorongkan sebagai mode perdagangan dunia, dimana kekuasaan regulasi negara atas perekonomian domestik sangat dibatasi. Dengan kata lain negara hanya mengurus persoalan non-ekonomi, sedangkan masalah ekonomi (perdagangan internasional) diambil alih oleh lembaga internasional, antara lain WTO dan IMF. Sehingga tidaklah mengherankan jika pinjaman luar negeri atau utang luar negeri adalah salah satu "hantu" bagi pembangunan ekonomi negara Dunia Ketiga pada saat ini. Beberapa referensi yang mengkaji mengenai pembangunan di negara-negara berkembang mulai melihat persoalan pinjaman luar negeri sebagai salah satu pusat penyebab keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Beberapa persoalan yang timbul dari utang luar negeri adalah memperlebar jurang antara negara-negara miskin di bagian selatan dan negara-negara kaya di bagian utara; memiskinkan penduduk di negara-negara Dunia Ketiga; dan sering pula dilihat sebagai sebuah bentuk penjajahan baru.

Tahun 2006, menurut perhitungan IMF, utang luar negeri dari 146 negara selatan melampaui 2.207 miliar USD dan uang yang harus mereka bayarkan adalah 495.3 miliar USD. Jumlah ini diakui sendiri oleh IMF bahwa angka ini melampaui kemampuan negara-negara di atas untuk membayar, mengingat nilai di atas sama dengan 80% dari seluruh export barang dan jasa dari negara-negara berkembang.<sup>26</sup>

Data yang ditunjukkan oleh organisasi masyarakat sipil lebih menyedihkan lagi. Menurut data dari Jubilee Debt Campaign, sebuah jaringan yang melakukan advokasi untuk menghapus utang luar negeri negara-negara berkembang, pada tahun 2006, total utang luar negeri negara-negara berkembang adalah 2.9 triliun USD, dan pada tahun yang sama mereka membayar 573 miliar USD.<sup>27</sup> Sementara

negara-negara paling miskin di dunia, pada tahun yang sama membayar 34 miliar USD kepada negara-negara kaya; artinya negara-negara miskin membayar 94 juta USD setiap harinya kepada negara-negara kaya. Perhitungan lain menunjukkan bahwa negara-negara berkembang membayar 13 USD untuk membayar kembali 1 USD; dan sekitar 60 negara termiskin telah membayar 550 miliar USD untuk pinjaman pokok dan bunganya, selama 30 tahun terakhir, namun masih berutang 523 miliar USD.<sup>28</sup> Tidak hanya negara-negara Amerika Latin yang menggantungkan nasibnya terhadap negara maju, beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia juga bernasib sama.<sup>29</sup>

Dampak secara politik juga diasumsikan kalangan *dependencia* dalam Mohtar Mas' oed<sup>30</sup>, bahwa keberadaan penetrasi asing ke dalam pertumbuhan ekonomi negara pinggiran akan menghambat munculnya demokrasi liberal, kehadirannya justru akan semakin memicu menguatnya kediktatoran. Dimana birokrasi negara dalam mengendalikan pemerintahan dan perusahaan negara yang menguasai berbagai sektor usaha sebagai aktor yang sangat aktif bersama-sama mengkonsolidasi kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya keberadaan teori ketergantungan mulai mendapat sorotan dan kritik, terutama dari kalangan sosial liberal dan mereka yang beraliran Marxis, termasuk penganut teori ketergantungan sendiri. Salah satu kritikan bagi teori ketergantungan dan keterbelakangan gagal mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara Dunia Ketiga, khususnya *New Industrializing Countries* (NICs).<sup>31</sup> Keberhasilan negara-negara industri baru Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hongkong memperkuat kritik terhadap *Dependencia*.

Adalah Bill Warren dalam bukunya *imperialism: a pioneer of Capitalism* mengkritik keras *Dependencia* dengan melihat bahwa kenyataannya, negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya, bahkan sedang mengarah pada pembangunan mandiri. Dalam hal ini Warren mendukung Marxis bahwa kapitalisme tidak dapat dicegah lagi dan akan menggejala di seluruh dunia, baru setelah mencapai titik jenuhnya perubahan sosialisme dimungkinkan.<sup>32</sup>

Kritik-kritik di atas secara tidak langsung meragukan eksistensi ketergantungan itu sendiri. Suatu teori dianggap berhasil apabila secara logika mampu menerjemahkan idenya dalam satu kesatuan yang utuh dan secara empiris dapat dibuktikan.<sup>33</sup> Sulit dibantah bahwa teori-teori pembangunan menjadi semarak ketika munculnya teori *dependencia* dengan segala pandangan dan perdebatannya, karena itu dengan segala kelemahannya teori ini memberikan perspektif baru pada teori pembangunan pada umumnya.

Di tengah timbul tenggelamnya kajian dependensia, saat ini fenomena dependensia kembali menggejala di negara berkembang dalam wujud yang agak berbeda dengan sebelumnya.<sup>34</sup> Jika sebelumnya teori ketergantungan yang berpangkal dari ide Marxis (materialisme) melihat ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju karena ketimpangan perekonomian semata. Kondisi pada saat teori ini muncul juga di karenakan wacana pembangunan yang berlangsung di era tersebut sangat terkait erat dengan struktur hegemoni pada ekonomi politik global.



Kini ketergantungan hadir lebih mencemaskan karena juga telah berdampak pada perubahan nilai ketika unsur-unsur ideologi, gaya hidup, pola konsumsi dan sebagainya telah menggeser “kemandirian” suatu bangsa dengan mengikuti pola kultur negara maju. Hampir semua negara berkembang mengalami penetrasi mendalam oleh dan sangat bergantung pada negara-negara maju. Penetrasi itu terjadi melalui berbagai cara selain ekonomi, politik dan kultural kini menjadi trend yang membawa perubahan nilai.

Penetrasi politik dan kultural datang melalui beberapa hal, derasnya arus informasi dan kecanggihan telekomunikasi, melalui berbagai paket materiil atau simbolik, seperti buku, program televisi, internet, majalah serta film, yang membawa unsur-unsur kultur industri barat sehingga mempengaruhi pola berfikir, bertindak, ideologi, nilai, pola konsumsi dan sebagainya. Menurut beberapa pengalaman negara pinggiran, kesempatan untuk ditulari kultur barat ini membuat banyak masyarakat mengalami perubahan nilai.<sup>35</sup>

Yang paling menonjol adalah munculnya pola konsumerisme khususnya dikalangan elit dan borjuis lokal. Para pengusaha lokal untuk lebih banyak menghasilkan barang-barang konsumsi mewah yang memerlukan teknologi impor (seperti kulkas, AC, televisi, telepon genggam, dan sebagainya). Pasar untuk konsumen kelas atas memang sempit, karena golongan mereka memang jumlahnya jauh lebih sedikit, akan tetapi mempunyai daya beli tinggi. Karena itulah para industrialis lokal sangat berkepentingan untuk memperbesar pasar “elit” dan tidak tertarik untuk memperbesar atau memperluas pasar “massa”. Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan antara elit dan massa.

Ketimpangan akan distribusi pendapatan sangat rentan mendorong timbulnya konflik, karena beberapa kelompok atau kelas akan memandang kelompok atau kelas lain memperoleh bagian yang semakin besar sedangkan mereka sendiri memperoleh sedikit atau bahkan merosot. Kondisi ini juga menjadi pemicu besarnya tindak kejahatan akibat kemiskinan yang ada. Hal ini memungkinkan tingkat distorsi sosial politik semakin meningkat.

Ketergantungan versi baru muncul yang tidak saja berimbas pada bidang perekonomian tapi telah membawa perubahan nilai, ideologi, budaya, dan pola konsumerisme yang di tulari dari kultur barat. Perlahan-lahan mengikis “kemandirian” bangsa dalam menentukan langkah selanjutnya.

Resistensi terhadap globalisasi dan sistem ekonomi kapitalis sebagai motor penggerak utama globalisasi sebenarnya sudah sering disuarakan, bahkan dari jantung kapitalisme itu sendiri. Berbagai peristiwa dekade terakhir, terutama krisis ekonomi tahun 1997 di Asia telah semakin menimbulkan kesadaran bahwa tatanan ekonomi dunia saat ini mencerminkan ketidak-adilan dan ketimpangan struktur ekonomi dibanyak tempat terutama negara-negara berkembang. Beberapa alternatif telah dimajukan, seperti *green economy*.

Belakangan banyak kalangan, termasuk ahli-ahli ekonomi Barat mulai melirik sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam sebagai pilar tatanan ekonomi baru dunia.<sup>36</sup> Ibnu Mariam menegaskan tatanan ekonomi baru yang diperlukan itu harus mencerminkan keadilan, pandangan yang sejajar terhadap manusia dan moralitas, hal ini sejalan dengan tatanan ekonomi yang ditawarkan Islam yang dilandasi dengan fondasi kuat, terdiri atas tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (perwakilan), dan ‘adalah (keadilan).<sup>37</sup>

Ketiga landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Tauhid merupakan muara dari semua pandangan dunia Islam. Tauhid mengandung arti alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Mahakuasa, yang bersifat esa, dan tidak terjadi secara kebetulan atau aksiden (Q.S. Ali Imran: 191; Shad: 27; al-Mu'minun: 15). Dari pandang tauhid manusia diciptakan, oleh karena itu asal manusia juga satu. Karena itu pulalah manusia merupakan khalifah-Nya atau wakil-Nya di bumi (Q.S. al-Baqarah:30; al-An'am:165). Sumber daya alam yang diciptakan harus dimanfaatkan untuk pemenuhan kebahagiaan seluruh umat manusia. Pada sisi ini, jelas bertentangan dengan konsep *self interest* kapitalisme. Implikasi dari pandangan tersebut adalah pandangan persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah karena statusnya sebagai wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pandangan ini tidak akan terlaksana secara substansial tanpa dibarengi dengan keadilan sosial-ekonomi. Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidak-adilan telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama Rasul Allah (Q.S.Hadid: 25). Berdasarkan landasan ini seharusnya ada keseimbangan dari semua faktor ekonomi, bahkan pemisahan yang radikal antara sektor moneter dengan sektor ril menjadi tidak tepat karena mengakibatkan terjadi ketidakadilan dan ketidak-merataan.

Mengatasi hal ini peran pemerintah khususnya di negara-negara berkembang harus lebih aktif dalam menyikapi tatanan ekonomi baru tersebut, paling tidak, mencakup empat hal.<sup>38</sup> *Pertama*, maksimalisasi tingkat pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus memperhatikan prinsip kesejajaran dan keseimbangan (equilibrium). Dalam ekonomi Islam konsep al-'adl dan al-ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejajaran sosial (Q.S. an-Nahl: 90). Hal ini penting, karena apabila terjadi pemanfaatan yang tidak seimbang atau pemborosan yang terjadi adalah kerusakan alam yang pada gilirannya adalah ketidakseimbangan sunnatullah (hukum alam). Kerugiannya juga pada manusia dalam jangka panjang.

*Kedua*, minimalisasi kesenjangan distributif. Tujuan ini berkaitan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, keadilan distributif. Keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Tujuan ini juga berhubungan dengan prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan (Q.S. al-A'raf ;32), prinsip tidak dikehendakinya pemusatan harta dan penghasilan pada sejumlah kecil orang tertentu (Q.S. al-Hasyr:7) dan untuk memperbaiki kemiskinan absolut dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang mencolok (Q.S. al-Ma'arij: 24-25). Untuk mencapai tujuan ini beberapa institusi Islam bisa dimanfaatkan seperti zakat dan wakaf.

*Ketiga*, maksimalisasi penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, sebagian karena mampu menciptakan kesempatan kerja (baru) yang lebih banyak daripada yang mungkin bisa diciptakan dalam keadaan ekonomi statis. Penciptaan lapangan kerja juga harus diimbangi dengan pemberian tingkat upah yang adil berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memastikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dengan mendorong kegiatan ekonomi yang aktif, terutama dalam sektor-sektor yang mampu menyerap semua lapisan.

Keempat, maksimalisasi pengawasan. Salah satu bagian integral dari kesatuan sistem ekonomi Islam adalah lembaga Hisbah. Peranannya, sebagaimana dirumuskan Ibn Taimiyah, adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial, sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Lembaga Hisbah adalah lembaga pengawasan terhadap penyimpangan, di antaranya dari kegiatan ekonomi. Dalam pemerintahan yang modern saat ini, lembaga ini dapat diaplikasikan dengan modifikasi tertentu yang mempunyai tugas dan wewenang yang sama. Pengawasan dalam ekonomi Islam adalah penting, karena suatu sistem ekonomi yang adil tidak akan berjalan apabila terjadi kecurangan yang disebabkan oleh perilaku menyimpang pelaku ekonomi.

## V. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Dari penelusuran pemikiran di atas, kita dapat mengklasifikasi pemikiran dependensia yang didasarkan pada pendapat; 1). Mereka yang percaya bahwa *dependencia* selalu akan membawa pada kemiskinan, 2). Mereka yang percaya bahwa pertumbuhan dibatasi oleh terbatasnya pasar, dan karenanya, cepat atau lambat akan mengakibatkan stagnasi, 3). Mereka yang masih percaya bahwa pertumbuhan bagi *periphery* adalah mungkin, tetapi selalu menjadi subordinat dari *center*.

Inti pandangan *dependencia* menunjukkan penyebab utama keterbelakangan negara-negara berkembang bersifat eksternal dan struktural. Bahkan beberapa pandangan teoritis sebelumnya sejalan dengan apa yang diutarakan Mohtar Mas' oed akan kehidupan ekonomi politik di negara pinggiran dikaitkan dengan sistem ekonomi politik internasional adalah disahkannya kekerasan. Baik penggunaan kekerasan secara langsung maupun meluasnya 'kekerasan struktural' yaitu ketimpangan dan kemiskinan.

Pendekatan ini cukup memenuhi untuk menjelaskan satu bagian hubungan sebab-akibat keterbelakangan di negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya. Hanya saja mereka belum mampu mencari jalan keluar dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Memutuskan hubungan dengan negara-negara maju dan sebaliknya melakukan kerjasama dengan negara-negara miskin atau berkembang juga masih menimbulkan dilema. Masalahnya apakah saran untuk memutuskan hubungan dengan negara maju dan bekerjasama diantara sesama negara miskin akan mampu menaikkan "bargaining position" negara-negara berkembang atau justru semakin menciptakan kemiskinan bersama diantara mereka?

Bagi Dunia Ketiga tidaklah akan pernah bisa melepaskan diri dari cengkraman kapitalis, proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yang kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional sudah di depan mata. Globalisasi seolah-olah meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga akan janji "pertumbuhan" ekonomi secara global. Meski bagi kalangan yang memihak pada yang lemah tetap menganggap globalisasi adalah "mitos" tidak lebih dari bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.

Atau bisa jadi keterbelakangan di negara Dunia Ketiga memang tidak hanya disebabkan oleh hubungan asimetris negara metropolis maju dan satelit, atau pusat dan periferi sebagai faktor eksternal, melainkan juga disebabkan faktor internal; buruknya manajemen di negara Dunia Ketiga; terlalu besarnya campur tangan

pemerintah dalam perekonomian, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merebak, serta kesalahan mengelola dan mengalokasikan sumber daya.

Suka atau tidak suka, globalisasi telah dan segera menyapa setiap negara, setiap masyarakat di dunia. Oleh karena itu, tidak satu negarapun mampu dan menganggap perlu untuk mengisolasi diri dari pengaruh perekonomian dunia. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar manfaat yang dapat dinikmati dan mudharat yang bakal dipikul oleh setiap negara yang terlibat dalam proses globalisasi akan terpulang kepada kesiapan negara yang bersangkutan dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

#### A. SARAN

Keterbelakangan Dunia Ketiga saat ini memang sebuah keniscayaan, namun menyalahkan pihak eksternal semata akan sebuah ketertinggalan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya. Menarik menyimak kembali pandangan Begawan ekonomi Soemitro, walaupun perekonomian Indonesia pincang sebagai akibat penjajahan, tetapi tidak semata-mata menyalahkan penjajah sebagai faktor eksternal, sebab dari segi internal kita sebagai bangsa masih memiliki banyak kelemahan. Pilihannya peran dan campur tangan pemerintah harus dilakukan (namun sewajarnya saja). Artinya pemerintah harus mengambil peranan utama dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah harus campur tangan secara langsung dalam segala ragam kegiatan ekonomi melalui berbagai macam peraturan, karena hal ini justru akan mengekang kegiatan ekonomi masyarakat. Intervensi pemerintah menjadi penting dan bermakna untuk menanggulangi dan meniadakan keganjilan dan ketimpangan yang melekat pada struktur ekonomi, bukan sebaliknya, di mana secara sadar atau tidak sadar intervensi pemerintah seringkali justru membawa akibat yang cenderung memperkuat distorsi yang sudah ada dan menimbulkan distorsi baru. Tata ekonomi baru dunia baru memang sangat dibutuhkan, dalam hal ini tatanan yang lebih adil tentunya dan ekonomi Islam dapat dijadikan salah satu solusinya, karena dibangun diatas tiga landasan utama khususnya yang mencerminkan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Francis, *Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan* (Yogyakarta ; Tiara Wacana: 1991)
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia; 1995)
- Browet, John, " The Newly Industrializing Countries and Radical Theories of Development", *World Development* 13, No. 7, 1986
- Dos Santos, Theotonio, "The Sctructure of Dependence", *American Economic Review*, Vol 60 (2), May, 1970
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta; Erlangga; 2005)
- Erani, Ahmad Yustika, *Ekonomi-Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009)
- Fakih, Mansoer, *Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta; Insist dan Pustaka Pelajar, 2001)

- Gunder, Andre Frank, *Capitalism and Development in Latin America* (New York; Monthly Review Press)
- Hettne, Bjorn *Teori Pembangunan Dan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia; 2001)
- Mas' oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta; LP3ES; 1990)
- Strahm, Rudolf H, *Kemiskinan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Pustaka Cidesindo; 1999)
- Staniland Martin, *What is Political Economy?* (New Heaven; Yale University Press: 1985)
- Suryadi, Budi, *Ekonomi Politik Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD:2006)
- Todaro, Michael, P, *Economic Development In The Third World*, ( New York; Logman Inc; 1985)
- Tulus Warsito, Masa Depan Dunia Ketiga, *Suara Pembaharuan*, Rabu 23 Februari 2001  
Utang Luar Negeri Indonesia dikutip dari  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/16/16380717/Utang.Luar.Negeri.Indonesia>, diakses pada tanggal 12 September 2010

Terjemusny Negara-Negara Berkembang Dalam Utang Luar Negeri  
<http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09DebeGute.html>, diakses tanggal 13 September 2010

---

<sup>1</sup> Terlepas dari perdebatan istilah Dunia Ketiga, dalam pengertian sehari-hari Dunia Ketiga seringkali diidentikkan dengan Negara Selatan, Negara Non-Blok, Negara Sedang Berkembang, Negara Miskin, Negara Pinggiran (Pheripery)

<sup>2</sup> Bjorn Hettne, *Teori Pembangunan Dan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia; 2001). h.146

<sup>3</sup> Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta; Erlangga; 2005), h.89

<sup>4</sup> Lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; PT Gramedia, 1995), h. 45

<sup>5</sup> Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu bangsa sebaiknya mengimpor kalau "opportunity cost" dari barang impor itu (yaitu, apa yang harus dikorbankan untuk mengimpor barang itu) lebih kecil dari pada "opportunity cost" dari produk domestik (yaitu, apa yang dikorbankan untuk memproduksi barang itu di dalam negeri), prinsipnya adalah memperoleh barang yang diinginkan dengan pengorbanan sesedikit mungkin.

<sup>6</sup> Michael P. Todaro, *Economic Development In The Third World*, (New York; Logman Inc; 1985), h.383

<sup>7</sup> Arief, *op.cit*, h. 18

<sup>8</sup> Michael Todaro, *Op.Cit*, h. 352

<sup>9</sup> Budi Suryadi, *Ekonomi Politik Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD:2006), h.2

<sup>10</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi-Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2009) h.7

<sup>11</sup> Martin Staniland, *What is Political Economy ?* ( New Heaven: Yale University Press: 1985)

<sup>12</sup> Deliarnov, *Op. Cit*, h.4

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, ( Jakarta; LP3ES;1990), h. 204

<sup>14</sup> Theotonio Dos Santos, "The Sctructure of Dependence", *American Economic Review*, Vol 60 (2), May, 1970, h. 231

<sup>15</sup> Bjorn, *loc.cit*

<sup>16</sup> Arief, *op.cit*, h. 46

- 
- <sup>17</sup> Deliarnov, *op.cit*, h. 83
- <sup>18</sup> Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan*, (Yogyakarta ; Tiara Wacana: 1991), h.109
- <sup>19</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit*, h. 206
- <sup>20</sup> Amir Effendi Siregar, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, (Yogyakarta; Tiara Wacana;1999), h. 240
- <sup>21</sup> Andre Gunder Frank, *Capitalism and Development in Latin America* (New York; Monthly Review Press), h.167
- <sup>22</sup> Rudolf H .Strahm, *Kemiskinan di Dunia Ketiga*, pengant. Mubyarto, (Jakarta; Pustaka Cidesindo,1999), h.3
- <sup>23</sup> *Ibid*, h.61
- <sup>24</sup> *Ibid*, h.63
- <sup>25</sup> Ahmad Erani, *Op.Cit*, h. 127
- <sup>26</sup> Charles W. Kegley, Jr. (2007). World Politics: Trend and Transformation. Belamont, CA: Thompson. P, dikutip dalam [www.laohamutuk.org/econ/debt/09DebeGute.html](http://www.laohamutuk.org/econ/debt/09DebeGute.html), diakses tanggal 13 September 2010
- <sup>27</sup> *Ibid*
- <sup>28</sup> *Ibid*
- <sup>29</sup> Utang luar negeri Indonesia per Januari 2010 mencapai US\$ 174,041 miliar, jika dikonversi kedalam kurs Rp 10.000 per dollar nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun. Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/16/16380717/Utang.Luar.Negeri.Indonesia>, diakses pada tanggal 12 September 2010
- <sup>30</sup> Mohtar Mas' oed, *loc.cit*
- <sup>31</sup> Lihat John Browet, “ The Newly Industrializing Countries and Radical Theories of Development”, *World Development* 13, No. 7, 1986, h. 43
- <sup>32</sup> Arief, *op.cit*, h. 102
- <sup>33</sup> L. Sklair, “Transcending The Impasse: methatheory, Theory, and Empirical Research In Sociology of Development and Underdevelopment”, dikutip dalam, *Analisis CSIS*, Thn XXIV, No. 4, Juli-Agustus, 1995, h. 62
- <sup>34</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit*, h. 204
- <sup>35</sup> *Ibid*, h. 206
- <sup>36</sup> Globalisasi dan Tatanan Ekonomi Islam, dikutip dalam <http://ibnumariam.wordpress.com/2010/06/22/globalisasi-dan-tatanan-ekonomi-islam/>, diakses tanggal 6 April 2011
- <sup>37</sup> *Ibid*
- <sup>38</sup> *Ibid*